



BPR KMI
KREDIT MANDIRI INDONESIA

PT BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA

LAPORAN TATA KELOLA

SEMESTER 1 (SATU) TAHUN 2026

BAB I PENJELASAN UMUM

PT BPR Kredit Mandiri Indonesia (selanjutnya disingkat “BPR KMI”) menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BPR KMI ditujukan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi BPR KMI, yaitu : “Menjadi Bank Komunitas yang dipercaya dalam kemitraan dengan masyarakat.”
- b. Mendukung misi BPR KMI, yaitu : “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan komunitas dengan memberikan akses keuangan yang mudah.”
- c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).

Tata Kelola Perusahaan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip :

1. Transparansi (*Transparency*) Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (*Independence*) Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran dan Kesenjajaran (*Fairness*) Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola

Nama BPR	PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA
Alamat	Jl Boulevard BSD Timur Blok AH 2 No 7, Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15310
Nomor Telepon	(021) 80634561
Posisi Laporan	30 Juni 2026
Peringkat Komposit	2
Predikat Komposit	Baik
Kesimpulan / Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Andy
	NIK	:	1275021404840005
	Jabatan	:	Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :			
a. Memimpin dan mengurus BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR KMI b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BPR KMI untuk kepentingan BPR KMI c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris; d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi f. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya; h. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasi pengembangan produk-produk funding dan memastikan bahwa pengembangan serta penawaran tersebut merupakan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. i. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. j. Mengawasi kelancaran kegiatan BPR KMI sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Mengungkapkan kepada karyawan Kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan yang dapat diakses seluruh karyawan, Website BPR KMI, kebijakan mengenai Sistem Recruitment, Sistem Promosi, Sistem Remunerasi melalui sarana yang diakses oleh Karyawan.			

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
2.	Nama	:	Darwhin Sinarta
	NIK	:	3203012012800006
	Jabatan	:	Direktur
Tugas dan Tanggung Jawab :			
a. Merumuskan dan mengimplementasikan strategi IT yang sejalan dengan visi dan misi BPR Kredit Mandiri Indonesia. b. Mengidentifikasi teknologi baru yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi BPR Kredit Mandiri Indonesia. c. Mengawasi infrastruktur IT, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data center. d. Memastikan ketersediaan, keandalan, dan skalabilitas sistem IT. e. Mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan IT untuk melindungi data nasabah dan sistem bank. f. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri, seperti ISO 27001, PCI DSS, atau regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). g. Mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang berkaitan dengan teknologi. h. Menyusun rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) dan memastikan kesiapan operasional dalam situasi darurat. i. Memimpin pengembangan, pengujian, dan peluncuran sistem baru untuk mendukung operasional bank. j. Berkolaborasi dengan departemen lain untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan bisnis. k. Memimpin dan mengembangkan tim IT, termasuk perekrutan, pelatihan, dan evaluasi kinerja. l. Berkoordinasi dengan vendor, mitra teknologi, dan regulator. m. Mendorong inisiatif transformasi digital di seluruh bank. n. Memberikan laporan berkala kepada dewan direksi mengenai status, peluang, dan tantangan terkait teknologi. o. Mengawasi proyek-proyek IT strategis, termasuk integrasi teknologi dalam merger atau akuisisi. p. Menyediakan solusi yang mendukung pengalaman nasabah, seperti pengembangan layanan perbankan digital atau aplikasi mobile banking.			

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
3.	Nama	:	Suhendra
	NIK	:	3172061710890002
	Jabatan	:	Direktur
Tugas dan Tanggung Jawab :			
a. Memimpin dan mengurus BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR Kredit Mandiri Indonesia. b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BPR Kredit Mandiri Indonesia untuk kepentingan BPR Kredit Mandiri Indonesia. c. Bertanggung jawab dalam seluruh proses operasional. d. Menyusun strategi agar target perusahaan bisa tercapai. e. Melakukan pengecekan dan pengawasan kebutuhan terkait operasional perusahaan f. Membuat rencana, mengambil keputusan, dan berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. g. Melakukan pengawasan dan memastikan setiap karyawan menjalankan tugas dengan baik h. Bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan BPR Kredit Mandiri Indonesia. i. Bertanggung jawab membuat laporan keuangan BPR Kredit Mandiri Indonesia. j. Mengawasi laporan keuangan BPR Kredit Mandiri Indonesia. k. Menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan BPR Kredit Mandiri Indonesia. l. Meminimalisir resiko keuangan yang mungkin merugikan perusahaan. m. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. o. Melaksanakan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR Kredit Mandiri Indonesia pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. p. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan di bidang keuangan BPR Kredit Mandiri Indonesia. q. Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan unit kerja di bidang keuangan, serta berkoordinasi dengan Direktur lainnya.			

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
4.	Nama	:	Jemmy ST
	NIK	:	7371121002820010
	Jabatan	:	Direktur
Tugas dan Tanggung Jawab :			
a. Memimpin dan mengurus BPR Kredit Mandiri Indonesia sesuai dengan Visi dan Misi BPR Kredit Mandiri Indonesia. b. Merumuskan strategi bisnis jangka pendek, menengah, dan panjang yang sejalan dengan visi dan misi BPR Kredit Mandiri Indonesia. c. Mengidentifikasi peluang pasar baru dan memperluas portofolio produk dan layanan bank dan menetapkan target pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, dan profitabilitas. d. Menetapkan target pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, dan profitabilitas. e. Memastikan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, baik untuk segmen ritel, korporasi, maupun UMKM. f. Mendorong inovasi dalam pengembangan produk, termasuk adopsi teknologi terbaru. g. Mengelola hubungan dengan nasabah prioritas dan korporasi besar untuk memastikan loyalitas dan kepuasan pelanggan. h. Mengawasi operasional cabang dan memastikan pencapaian target penjualan di setiap wilayah. i. Mengawasi manajemen risiko terkait kegiatan bisnis untuk meminimalkan kredit bermasalah (NPL) dan risiko lainnya. j. Melakukan analisis kinerja bisnis secara berkala dan menyusun laporan untuk dewan direksi. k. Memimpin, membimbing, dan mengembangkan tim bisnis bank agar mampu mencapai target yang ditetapkan. l. Menyusun kebijakan insentif dan penghargaan untuk memotivasi karyawan. m. Memastikan semua aktivitas bisnis mematuhi regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas lainnya. n. Melakukan analisis pasar untuk memahami tren industri, kebutuhan pelanggan, dan perubahan perilaku konsumen. o. Mengawasi strategi pesaing dan menyesuaikan pendekatan bisnis bank untuk tetap kompetitif. p. Melakukan evaluasi strategi bisnis dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan.			

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
5.	Nama	:	Lukman Nelam
	NIK	:	1471110201650022
	Jabatan	:	Direktur
Tugas dan Tanggung Jawab :			
a. Merumuskan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko kredit. b. Memastikan bahwa portofolio kredit bank dikelola secara optimal untuk meminimalkan potensi kerugian. c. Menyusun strategi mitigasi risiko, termasuk diversifikasi portofolio kredit dan pengelolaan eksposur risiko d. Mengawasi proses analisis kelayakan kredit. e. Memastikan bahwa pengelolaan risiko kredit sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). f. Mengawasi pengembangan sistem scoring kredit dan alat analisis risiko yang berbasis teknologi. g. Memastikan penerapan sistem IT yang mendukung pengelolaan risiko kredit secara efektif. h. Mengelola kredit bermasalah (non - performing loans/NPL) melalui negosiasi, restrukturisasi, atau tindakan hukum i. Memonitor proses penyelesaian sengketa kredit, baik secara litigasi maupun nonlitigasi (mediasi atau arbitrase). j. Memastikan bahwa proses litigasi dijalankan dengan mempertimbangkan perlindungan kepentingan bank. k. Menyusun strategi hukum yang proaktif untuk menghindari potensi sengketa kredit. l. Berkomunikasi dengan pengacara eksternal, penegak hukum, atau pihak lain yang terlibat dalam litigasi kredit. m. Berkoordinasi dengan regulator untuk memastikan proses litigasi sesuai dengan ketentuan. n. Memimpin tim manajemen risiko kredit dan tim litigasi, termasuk pengembangan keterampilan dan penilaian kinerja o. Mengarahkan tim untuk mencapai efisiensi dalam mitigasi risiko kredit dan penyelesaian litigasi. p. Menyusun laporan berkala tentang kinerja portofolio kredit, risiko yang dihadapi, serta status litigasi. q. Memberikan masukan kepada direksi terkait strategi risiko kredit dan kebijakan litigasi. r. Memastikan dapat mengelola risiko kredit secara efisien sekaligus meminimalkan dampak litigasi pada operasional dan reputasi BPR Kredit Mandiri Indonesia.			

No				Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
6.	Nama	:		Dimas Purwita Kamajaya
	NIK	:		3206361604810001
	Jabatan	:		Direktur YMF Kepatuhan
				Tugas dan Tanggung Jawab :
				a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan & peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank. f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan; h. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan i. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur BPR j. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan k. Melakukan Hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perusahaan Terbatas, apabila untuk perbuatan- perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.
				Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
				Anggota Direksi selalu melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris, terutama kepatuhan mengenai regulasi, penerapan manajemen risiko serta pencapaian target yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Melvin Wangkar
	NIK	:	3171011105900001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :			
a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi b. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BPR KMI, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR KMI. c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR KMI d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. e. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR KMI. f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR KMI. g. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris. i. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. j. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan			

2.	Nama	:	Handoko Kuarso
	NIK	:	3273172110680001
	Jabatan	:	Komisaris Independen
Tugas dan Tanggung Jawab :			
a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi b. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BPR Kredit Mandiri Indonesia dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR KMI sesuai dengan Visi dan Misi BPR Kredit Mandiri Indonesia. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Kredit Mandiri Indonesia. c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Kredit Mandiri Indonesia d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia e. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR Kredit Mandiri Indonesia. f. Menilai kecukupan fungsi audit intern BPR Kredit Mandiri Indonesia, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku g. Mengkaji dan evaluasi atas kecukupan dari fungsi Audit Intern BPR KMI, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan berikut anggarannya dan pekerjaan yang telah dilaksanakan. h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Manajemen dan Satuan Kerja Operasional/ Auditee terkait lainnya dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern. i. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR KMI. j. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. k. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir			

3.	Nama	:	Tirta Hadi Surjana
	NIK	:	3271061410700001
	Jabatan	:	Komisaris Independen
Tugas dan Tanggung Jawab :			
a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip - prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR KMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurus BPR KMI dan memberi nasihat kepada Direksi, Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR KMI sesuai Visi dan Misi. c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. e. Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif. f. terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. g. Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapinya. h. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. i. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR KMI. j. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR KMI. k. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. l. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani anggota Dewan Komisaris yang hadir.			
Rekomendasi kepada Direksi			
1. Menyusun parameter penilaian kolektabilitas yang lebih komprehensif 2. Melakukan akselerasi digitalisasi secara hati-hati, diiringi pembaruan sistem, penyesuaian budaya kerja baru, dan revisi SOP pasca-merger. 3. Rekonsiliasi & Monitoring berkala. 4. Digitalisasi & standarisasi administrasi. 5. Koordinasi dengan IT untuk pengembangan sistem.			

3. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Audit b. Merumuskan kebijakan Audit Perusahaan, termasuk spesifikasi Audit. c. Memastikan bahwa kebijakan Audit Perusahaan sesuai dengan regulasi terkait dengan Audit d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan Audit e. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia f. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan g. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee i. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal j. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan k. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan dan l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko b. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan c. Merumuskan kebijakan manajemen risiko perusahaan, termasuk spesifikasi risk appetite /risk tolerance. d. Memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan regulasi terkait dengan manajemen risiko dan permodalan yang berlaku e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait risk appetite f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan. g. Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan: 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Manajemen Risiko; 3) Review laporan posisi risiko secara berkala dan upaya peningkatan litigasi risiko yang dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko maupun bagian/seksi yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik.
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 1) Struktur Remunerasi; 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan 3) Besaran atas Remunerasi; b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris. c. Dalam memberikan rekomendasi terkait dengan kebijakan remunerasi Komite memperhatikan : 1) Kinerja keuangan 2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Prestasi kerja individual; 4) Kewajaran dengan peer group; dan 5) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.

b. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	- Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan hak akses pengguna (user access management) untuk memastikan bahwa user yang bertanggung jawab telah diberikan hak akses sesuai tugas dan kewenangannya, serta memastikan terdapat mekanisme verifikasi dan persetujuan akses oleh minimal satu pihak independen sebagai bagian dari pengendalian akses (access control). - Audit IT dengan unit internal control akan lebih mempertajam pengecekan security dalam suatu data.
	Realisasi	:	- Pemeriksaan Audit IT atas Matriks Hak Akses Pengguna (User Access Matrix) pada seluruh modul Aplikasi Micro periode Semester I Tahun 2026 telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian hak akses kepada setiap pengguna telah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, serta mendukung penerapan pengendalian akses yang memadai. - Akan dilaksanakan Pemeriksaan Audit IT atas Pengelolaan dan Keamanan Data Center (DC) serta Disaster Recovery Center (DRC) yang dikelola oleh vendor baru, guna memastikan efektivitas pengelolaan infrastruktur TI, kecukupan pengendalian keamanan informasi, serta kesiapan mekanisme pemulihan layanan dalam mendukung keberlangsungan operasional perusahaan.
	Jumlah Rapat	:	2
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	- Pemantauan Tingkat Kesehatan Bank (TKS). - Pemantauan Profil Risiko Bank. - Penilaian & Evaluasi penerapan program-program Manajemen Risiko. - Evaluasi risiko-risiko yang dihadapi Bank. Penguatan fungsi pengawasan dan pengembangan Manajemen Risiko.

	Realisasi	:	1. Melakukan pemantauan Tingkat Kesehatan Bank (TKS) melalui evaluasi Profil Risiko Bank, perkembangan parameter dan tren risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap parameter-parameter yang menjadi perhatian sebagai dasar pemberian rekomendasi kepada Direksi dalam menjaga tingkat kesehatan Bank 2. Melakukan evaluasi terhadap penyusunan Risk Register Tahun 2026 sebagai dasar pemantauan risiko Bank. 3. Melakukan pemantauan pelaksanaan Risk Control Self Assessment (RCSA) sebagai evaluasi efektivitas pengendalian risiko, serta memberikan rekomendasi penyempurnaan mitigasi risiko dan metode pengukuran risiko pada unit kerja yang masih memerlukan perbaikan. 4. Melakukan pemantauan hasil Risk Rank Operasional sebagai bagian dari evaluasi tingkat risiko operasional pada kantor cabang, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap cabang dengan tingkat risiko yang memerlukan perhatian. 5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Business Continuity Plan (BCP) guna memastikan kesiapan Bank dalam menghadapi kondisi darurat dan gangguan operasional, serta merekomendasikan melakukan simulasi bencana alam di Kantor Pusat dan sosialisasi system down di Kantor Cabang. 6. Melakukan pembahasan dan evaluasi Stress Testing untuk mengukur ketahanan Bank terhadap berbagai skenario risiko dan perubahan kondisi ekonomi, serta merekomendasikan penyempurnaan asumsi dan pengembangan skenario stress testing sebagai dasar penguatan mitigasi risiko. 7. Melakukan pemantauan terhadap proses merger serta evaluasi potensi risiko yang timbul, termasuk perubahan sistem, proses bisnis, dan budaya kerja. 8. Komite memberikan rekomendasi peningkatan koordinasi antara SKMR dan SKAI melalui pemanfaatan hasil audit sebagai dasar evaluasi profil risiko, penerapan Risk Based Audit, pengembangan data pendukung manajemen risiko, analisis gap terhadap ketentuan regulator terbaru.
--	-----------	---	--

	Jumlah Rapat	:	2
--	--------------	---	---

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	1. Pelatihan dan Pengembangan 2. Performance Management 3. Insentive dan Crash Program
	Realisasi	:	1. Pelatihan dan Pengembangan Awal tahun 2026, Melaksanakan training Program Training yang dijalankan adalah sebagai berikut : a. Training orientasi, b. Training karir (Ibest Leadership Program) c. Training soft skill per jabatan (Leadership Journey Training) d. Training teknis perfunction (Business Academy) 2. Performance Management a. Performance Management dijalankan dengan pengukuran KPI bulanan untuk karyawan cabang b. Untuk Karyawan Head Office pengukuran kinerja semester dilakukan melalui pengukuran KPI dari bulan Januari – Juni 2026. c. Hasil kinerja karyawan ini sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target Semester 1 2026 dan menjadi bahan evaluasi bagi pencapaian karir karyawan terkait, yang akan berdampak terhadap pencapaian insentif serta promosi karir karyawan 3. Insentive dan Crash Program a. Perusahaan membuat skema insentif dan crash program bulanan yang menggerakkan karyawan untuk bisa memberikan pencapaian terbaik yang diukur melalui KPI per jabatan.
	Jumlah Rapat	:	1

4. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	Handoko Kuarso	3273172110680001	Akuntansi	1. Ketua (Komite Audit) 2. Ketua (Komite Remunerasi dan Nominasi)	iya
2.	Alkie Samuel Sutandra	3172012004590011	Akuntansi	1. Anggota (Komite Audit) 2. Anggota (Komite Pemantau Resiko)	iya
3.	Ong Tek Tjan	3172061308690003	Akuntansi	Anggota (Komite Audit)	iya
4.	Melvin Wangkar	3171011105900001	Manajemen	Anggota (Komite Remunerasi dan Nominasi)	Tidak
5.	Viciania Dewi Kristiani	130406011119999	Manajemen	Anggota (Komite Remunerasi dan Nominasi)	iya
6.	Dimas Purwita Kamajaya	3206361604810001	Manajemen	Ketua (Komite Manajemen Risiko)	iya
7.	Lukman Nelam	1471110201650022	Manajemen	Anggota (Komite Manajemen Risiko)	iya
8.	Suhendra	3172061710890002	Akuntansi	Anggota (Komite Manajemen Risiko)	iya
9.	Muhammad Akbar Baihaqi	3201021501990004	Manajemen	Anggota (Komite Manajemen Risiko)	iya
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Masing- masing di setiap komite akan menjalankan fungsinya dan melakukan rapat secara berkala.	

5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	NIK	Nominal(Rp)	Persentase
1.	Andy	1275021404840005	Rp.363.300.000	0.25%
2.	Darwhin Sinarta	3203012012800006	Rp.108.000.000	0.08%
3.	Suhendra	3172061710890002	Rp.144.000.000	0.10%
4.	Jemmy ST	7371121002820010	Rp.108.000.000	0.08%
5.	Lukman Nelam	1471110201650022	Rp.144.000.000	0.10%
6.	Dimas Purwita Kamajaya	3206361604810001	Rp. 0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
5 anggota direksi yang memiliki saham di PT BPR Kredit Mandiri Indonesia				

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Direksi	NIK	Nominal(Rp)	Persentase
1.	Melvin Wangkar	3171011105900001	Rp.14.378.100.000	10,05%
2.	Handoko Kuarso	3273172110680001	Rp0	0%
3.	Tirta Hadi Sujana	3271061410700001	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hanya Salah satu Komisaris yang memiliki saham di PT BPR Kredit Mandiri Indonesia				

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Grup BPR	Nama Perusahaan dalam Grup BPR	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Andy	1275021404840005	-	-	0%
2.	Darwhin Sinarta	3203012012800006	-	-	0%
3.	Suhendra	3172061710890002	-	-	0%
4.	Jemmy ST	7371121002820010	-	-	0%
5.	Lukman Nelam	1471110201650022	-	-	0%
6.	Dimas Purwita Kamajaya	3206361604810001	-	-	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada anggota direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia yang memiliki saham di kelompok usaha BPR

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Grup BPR	Nama Perusahaan dalam Grup BPR	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Melvin Wangkar	3171011105900001	-	-	0%
2.	Handoko Kuarso	3273172110680001	-	-	0%
3.	Tirta Hadi Surjana	3271061410700001	-	-	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :

BPR Kredit Mandiri Indonesia bukanlah perusahaan yang termasuk dalam grup BPR tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di kelompok usaha BPR

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Perusahaan Lain

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Lukman Nelam	1471110201650022	-	Esta Kapital Fintek	1.00%
2.	Lukman Nelam	1471110201650022	-	Esta Digital Niaga	0.62%
3.	Lukman Nelam	1471110201650022	601698	PT. BPR Kredit Mandiri Kalsel	0.48%
4.	Andy	1275021404840005	601698	PT. BPR Kredit Mandiri Kalsel	0.57%
5.	Darwhin Sinarta	3203012012800006	601698	PT. BPR Kredit Mandiri Kalsel	0.48%
6.	Suhendra	3172061710890002	601698	PT. BPR Kredit Mandiri Kalsel	0.48%
7.	Jemmy ST	7371121002820010	601698	PT. BPR Kredit Mandiri Kalsel	0.48%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Ada 5 anggota direksi yang memiliki saham pada perusahaan lain.

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Melvin Wangkar	3171011105900001	523	PT. Bank Sahabat Sampoerna	0.62%
2.	Melvin Wangkar	3171011105900001	601698	PT. BPR Kredit Mandiri Kalsel	7.23%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Satu dewan komisaris memiliki saham di perusahaan lain					

8. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Andy	1275021404840005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Darwhin Sinarta	3203012012800006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Suhendra	3172061710890002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Jemmy ST	7371121002820010	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	Lukman Nelam	1471110201650022	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6.	Dimas Purwita Kamajaya	3206361604810001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan keuangan anggota direksi pada BPR					

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Melvin Wangkar	3171011105900001	Tidak Ada	Tidak Ada	Yan Peter Wangkar - Orang Tua
2.	Handoko Kuarso	3273172110680001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Tirta Hadi Surjana	3271061410700001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Salah satu dewan komisaris memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham					

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham

No	Nama Pemegang Saham BPR	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Yan Peter Wangkar	3171012604610002	Tidak Ada	Melvin Wangkar - Anak	1. Melvin Wangkar - Anak 2. Melivia Wangkar - Anak
2.	Melvin Wangkar	3171011105900001	Tidak Ada	Tidak Ada	1. Yan Peter Wangkar - Orang Tua 2. Melivia Wangkar - Saudara Kandung
3.	Melivia Wangkar	3171015106920001	Tidak Ada	Melvin Wangkar - Saudara Kandung	1. Yan Peter Wangkar - Orang Tua 2. Melvin Wangkar - Saudara Kandung
4.	Andy	1275021404840005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.	Victor Danny Wangkar	3172060910810011	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6.	Merry Mawardi	7171094408750001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

7	Lukman Nelam	1471110201650022	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Suhendra	3172061710890002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Jemmy, ST	7371121002820010	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Darwhin Sinarta	3203012012800006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

- 1) Tidak ada hubungan keuangan anggota direksi pada BPR
- 2) Salah satu dewan komisaris memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham
- 3) Ada 7 Pemegang yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi, Komisaris,

4. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Andy	1275021404840005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Darwhin Sinarta	3203012012800006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Suhendra	3172061710890002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Jemmy ST	7371121002820010	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	Lukman Nelam	1471110201650022	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6.	Dimas Purwita Kamajaya	3206361604810001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Hubungan keluarga anggota direksi pada BPR tidak ada					

5. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Melvin Wangkar	3171011105900001	Tidak Ada	Tidak Ada	Yan Peter Wangkar - Orang Tua
2.	Handoko Kuarso	3273172110680001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Tirta Hadi Surjana	3271061410700001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Salah satu dewan komisaris memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham					

6. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No	Nama Pemegang Saham BPR	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Yan Peter Wangkar	3171012604610002	Tidak Ada	Melvin Wangkar - Anak	1. Melvin Wangkar - Anak 2. Melivia Wangkar - Anak
2.	Melvin Wangkar	3171011105900001	Tidak Ada	Tidak Ada	1. Yan Peter Wangkar - Orang Tua 2. Melivia Wangkar - Saudara Kandung
3.	Melivia Wangkar	3171015106920001	Tidak Ada	Melvin Wangkar - Saudara Kandung	1. Yan Peter Wangkar - Orang Tua 2. Melvin Wangkar - Saudara Kandung
4.	Andy	1275021404840005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Victor Danny Wangkar	3172060910810011	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Merry Mawardi	7171094408750001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Lukman Nelam	1471110201650022	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Suhendra	3172061710890002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Jemmy ST	7371121002820010	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Darwhin Sinarta	3203012012800006	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
1) Hubungan keluarga anggota direksi pada BPR tidak ada 2) Salah satu dewan komisaris memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham 3) Hanya satu Pemegang Saham yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham lainnya					

9. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 6 Bulan)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	6	Rp.2.004.000.000	3	Rp.432.400.000
2	Tunjangan	0	Rp. 0	0	Rp. 0
3	Tantiem	0	Rp. 0	0	Rp. 0
4	Kompensasi berbasis saham	0	Rp. 0	0	Rp. 0
5	Remunerasi lainnya	0	Rp. 0	0	Rp. 0
6	Perumahan	0	Rp. 0	0	Rp. 0
7	Transportasi	0	Rp. 0	0	Rp. 0
Total			Rp.2.004.000.000		Rp.432.400.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 6 Bulan)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Ada	Ada
3	Asuransi Kesehatan	Ada	Ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah berupa transportasi mobil operasional dan asuransi kesehatan.			

10. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) :1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	15.4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3.2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	4.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1.7 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah BPR Kredit Mandiri Indonesia dinilai wajar	

11. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dalam Semester 1 (Satu) Tahun 2026

Pelaksanaan Rapat dalam Semester 1 (Satu) Tahun 2026

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10 Maret 2026	2	I. Evaluasi Kinerja Keuangan Februari 2026 a) Data Keuangan i. Asset Total *Dalam ribuan Total Asset mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, dari 768.566.115 pada Januari 2026 menjadi 778.003.748 pada Februari 2026. Peningkatan tersebut mencerminkan pertumbuhan aset Perseroan yang didukung oleh peningkatan aktivitas operasional dan aset produktif. ii. Asset Kredit *Dalam ribuan Asset Kredit mengalami penyesuaian dari 570.420.538 pada Januari 2026 menjadi 567.773.783 pada Februari 2026. Meskipun terjadi penurunan, penyaluran kredit tetap terjaga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bisnis Perseroan iii. Dana Pihak Ketiga *Dalam ribuan Total sumber pendanaan mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, dari 622.022.298 pada Januari 2026 menjadi 630.967.719 pada Februari 2026. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sesuai dengan penyajian laporan, serta kenaikan Simpanan Bank Lain dan Pinjaman diterima iv. Laba rugi mengalami peningkatan secara konsisten dari 24.828.074 ribu pada Desember 2025 menjadi 25.837.563 ribu pada Januari 2026, kemudian meningkat kembali menjadi 26.606.352 ribu pada Februari 2026, yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan terus mengalami pertumbuhan. 1. Kinerja Bisnis a) Lending Penyaluran kredit (Lending) pada Januari 2026 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan Desember 2025. Pada Februari 2026, realisasi lending mengalami penurunan dibandingkan Januari 2026, namun tetap berada di atas capaian Desember 2025. Hal ini menunjukkan aktivitas penyaluran kredit tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat fluktuasi secara bulanan b) NPL NPL mengalami penurunan dari 4,67% pada Desember 2025 menjadi 4,58% pada Januari 2026, kemudian sedikit meningkat menjadi 4,61% pada Februari 2026. Secara keseluruhan, rasio NPL masih berada pada

			level yang terkendali dan menunjukkan kualitas aset produktif yang tetap terjaga. Pembahasan Rapat Komisaris 1. Komisaris melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan rencana merger, termasuk kesiapan pemenuhan tahapan merger, penyelesaian dokumen pendukung, serta koordinasi dengan pihak terkait. Komisaris memberikan perhatian terhadap kesesuaian proses merger dengan ketentuan regulator dan target waktu yang telah ditetapkan. 2. Komisaris membahas kesiapan perusahaan dalam menghadapi perubahan pasca merger, meliputi kesiapan proses bisnis, operasional, sistem, sumber daya manusia, serta penyelarasan kebijakan internal agar kegiatan perusahaan dapat tetap berjalan secara efektif. 3. Komisaris melakukan evaluasi terhadap perkembangan bisnis perusahaan menjelang merger, termasuk pertumbuhan aset, penyaluran kredit, penghimpunan dana, serta kinerja keuangan sebagai dasar dalam melihat kesiapan perusahaan memasuki periode setelah penggabungan 4. Komisaris melakukan evaluasi terhadap profil risiko perusahaan serta kesiapan pengelolaan risiko dalam menghadapi proses merger, termasuk risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan, dan risiko strategis yang perlu menjadi perhatian selama masa transisi. 5. Komisaris melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan, fungsi kepatuhan, serta pemenuhan kewajiban kepada regulator untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Komisaris melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan program APU-PPT dan PPSPM, termasuk pelaksanaan kebijakan, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah, serta penguatan pengendalian internal sebagai bagian dari pengelolaan risiko perusahaan. 7. Komisaris membahas kesiapan komunikasi kepada pihak internal maupun eksternal terkait pelaksanaan merger serta langkah-langkah transisi yang diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional setelah
--	--	--	---

			penggabungan. 8. Komisaris melakukan monitoring terhadap penerapan tata kelola perusahaan dalam rangka memastikan kesiapan perusahaan menghadapi proses merger. Pembahasan mencakup pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab organ perusahaan, pemenuhan kewajiban kepada regulator, penyelarasan kebijakan internal, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi dan pemeriksaan yang masih berjalan. 9. Komisaris melakukan evaluasi terhadap profil risiko perusahaan serta kesiapan penerapan manajemen risiko dalam menghadapi proses merger. Pembahasan mencakup pengelolaan risiko utama perusahaan, termasuk risiko kredit, likuiditas, operasional, kepatuhan, dan strategis, serta langkah mitigasi yang perlu dilakukan untuk mendukung kelancaran proses transisi Arahan / Keputusan Rapat Komisaris 1. Komisaris meminta Direksi untuk memastikan seluruh tahapan persiapan merger berjalan sesuai dengan rencana kerja dan timeline yang telah ditetapkan, termasuk penyelesaian aspek legal, operasional, dan administrasi 2. Komisaris mengarahkan Direksi untuk melakukan monitoring terhadap kesiapan integrasi proses bisnis, sistem, serta struktur organisasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan merger 3. Komisaris meminta Direksi untuk menjaga kualitas kinerja perusahaan selama periode persiapan merger, termasuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan kredit, pendanaan, dan kondisi keuangan perusahaan 4. Komisaris mengingatkan Direksi agar penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan, APU-PPT, dan manajemen risiko tetap berjalan secara efektif selama proses persiapan merger. 5. Komisaris meminta Direksi untuk melakukan identifikasi terhadap potensi kendala yang dapat muncul selama proses transisi merger serta menyiapkan langkah penyelesaian yang diperlukan 6. Komisaris meminta Direksi menyampaikan perkembangan pelaksanaan merger secara berkala sebagai bahan monitoring dan evaluasi Komisaris. 7. Komisaris meminta Direksi untuk memastikan penerapan tata kelola tetap berjalan efektif selama proses persiapan merger, termasuk penyelesaian kewajiban kepada regulator dan penguatan koordinasi antar unit kerja. 8. Komisaris mengarahkan Direksi untuk melakukan
--	--	--	---

			monitoring terhadap risiko yang berpotensi timbul selama proses merger serta memastikan langkah mitigasi telah disiapkan secara memadai
2	10 Juni 2026	2	II. Evaluasi Kinerja Keuangan Mei 2026 c) Data Keuangan i. Asset Total *Dalam ribuan Total Aset mengalami fluktuasi selama periode Maret–Mei 2026, dengan peningkatan pada April 2026 dan mengalami penurunan pada Mei 2026 menjadi 771.476.357. Secara keseluruhan, posisi aset perusahaan tetap terjaga menjelang dan setelah pelaksanaan merger. ii. Asset Kredit *Dalam ribuan Asset Kredit mengalami fluktuasi selama periode Maret–Mei 2026, dengan penurunan pada April 2026 dan kembali meningkat pada Mei 2026 menjadi 569.897.350. Kondisi tersebut menunjukkan posisi aset kredit tetap terjaga menjelang dan setelah pelaksanaan merger. iii. Dana Pihak Ketiga *Dalam ribuan Total Sumber Pendanaan mengalami peningkatan pada April 2026 dan kembali mengalami penyesuaian pada Mei 2026 menjadi 633.633.080. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh pergerakan simpanan dan pinjaman diterima, dengan posisi pendanaan perusahaan tetap terjaga dalam mendukung kegiatan bisnis pasca merger Laba Rugi Laba Rugi mengalami peningkatan secara bertahap dari 17.752.534 pada Maret 2026 menjadi 22.701.564 pada Mei 2026. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang perlu terus dijaga melalui optimalisasi pendapatan dan pengendalian beban operasional. 1. Kinerja Bisnis a) Lending Lending mengalami peningkatan pada April 2026 dan mengalami penyesuaian pada Mei 2026 menjadi 26.020. Secara keseluruhan, penyaluran kredit tetap terjaga dengan dukungan strategi bisnis dan monitoring kualitas kredit secara berkelanjutan b) NPL NPL mengalami perbaikan secara bertahap dari 4,82%

			pada Maret 2026 menjadi 4,39% pada Mei 2026. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kualitas kredit yang perlu dipertahankan melalui penguatan monitoring dan pengelolaan risiko kredit Pembahasan Rapat Komisaris 1. Komisaris melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut pasca merger, termasuk penyelesaian aspek legal, operasional, sistem, organisasi, dan administrasi. Komisaris memberikan perhatian terhadap proses integrasi yang masih berjalan agar sesuai dengan ketentuan regulator dan target perusahaan 2. Komisaris membahas perkembangan proses integrasi pasca merger, termasuk penyesuaian proses bisnis, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta koordinasi antar unit kerja guna memastikan operasional perusahaan berjalan efektif dan mendukung pencapaian target bisnis. 3. Komisaris melakukan evaluasi terhadap perkembangan kinerja perusahaan pasca merger, meliputi kondisi aset, kredit, pendanaan, laba rugi, serta kualitas kredit sebagai bahan monitoring atas efektivitas proses integrasi dan stabilitas kinerja perusahaan. 4. Komisaris melakukan monitoring terhadap penerapan tata kelola perusahaan, termasuk efektivitas fungsi organ perusahaan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, pemenuhan kewajiban kepada regulator, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi dan pemeriksaan. 5. Komisaris melakukan evaluasi terhadap profil risiko perusahaan dan kesiapan pengelolaan risiko dalam menghadapi proses merger, termasuk risiko kredit, likuiditas, operasional, kepatuhan, dan strategis yang perlu menjadi perhatian selama masa transisi. 6. Komisaris melakukan monitoring terhadap penerapan Program APU-PPT dan PPSPM, termasuk efektivitas kebijakan dan prosedur, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah, serta penguatan pengendalian internal dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik Arahan / Keputusan Rapat Komisaris 1. Komisaris meminta Direksi untuk memastikan seluruh proses integrasi pasca merger dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta
--	--	--	---

			memenuhi ketentuan regulator. 2. Komisaris mengarahkan Direksi untuk memastikan integrasi operasional, sistem, organisasi, dan sumber daya manusia berjalan efektif sehingga tidak mengganggu kelangsungan operasional perusahaan. 3. Komisaris meminta Direksi menjaga stabilitas kinerja perusahaan pasca merger, termasuk melakukan monitoring terhadap kualitas kredit, penghimpunan dana, likuiditas, dan kondisi keuangan perusahaan. 4. Komisaris meminta Direksi memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), kepatuhan, Manajemen Risiko, APU-PPT, dan PPSPM tetap berjalan secara efektif selama proses integrasi pasca merger. 5. Komisaris mengarahkan Direksi untuk terus melakukan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi terhadap risiko yang timbul sebagai dampak proses integrasi pasca merger. 6. Komisaris meminta Direksi menyampaikan perkembangan pelaksanaan integrasi pasca merger secara berkala sebagai bahan pengawasan Komisaris serta memastikan setiap kendala yang muncul segera ditindaklanjuti
--	--	--	---

Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 6 Bulan :

Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat

12. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Melvin Wangkar	3171011105900001	2	0	100%
2.	Handoko Kuarso	3273172110680001	2	0	100%
3.	Tirta Hadi Surjana	3271061410700001	2	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat					

13. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 6 Bulan)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	4	5	1	4
Telah Diselesaikan		0		0	4	5	1	3
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0	0	0	0	1
Penjelasan Lebih Lanjut :								
1. Komitmen Direksi dan Komisaris Tidak ditemukan adanya kasus fraud yang melibatkan Anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris.								
2. Kasus Pegawai Tetap Dari 5 kasus pada tahun laporan, 5 kasus telah berhasil diselesaikan secara internal.								
3. Kasus Pegawai tidak Tetap Dari 4 kasus pada tahun laporan, 3 kasus telah dinyatakan selesai. Sementara 1 kasus telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.								

14. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	3
Total	2	3
Penjelasan Lebih Lanjut :		
Permasalahan Hukum yang Dihadapi Semester 1 (Satu) Tahun 2026 : 1. Secara keseluruhan, terdapat 5 permasalahan hukum (2 perdata dan 3 pidana) yang aktif. 2. Seluruh kasus masih dalam tahap penanganan proses penyelesaian.		

15. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	Melvin Wangkar	Komisaris Utama	3171011105900001	Suhendra	Direktur	3172061710890002	Sewa Ruko	Rp. 75.000.000	Plaza Sudirman Center Blok A.12 .Jl raya Sudirman Desa Pucung Kec. Kota Baru, Karawang
2.	Yeti Sopandi	Istri Pemilik	3171015904630003	Suhendra	Direktur	3172061710890002	Sewa Ruko	Rp. 106.166.666	Jl. Letjend Ibrahim Adji No. 159 Loji – Bogor
3	Melvin Wangkar	Komisaris Utama	3171011105900001	Suhendra	Direktur	3172061710890002	Sewa Ruko	Rp. 106.166.667	Jl. Major Oking No.5 Kel. Puspanega Kec. Citeureup Bogor
4	Melvin Wangkar	Komisaris Utama	3171011105900001	Suhendra	Direktur	3172061710890002	Sewa Ruko	Rp. 90.000.000	Jl. Terusan Kopo No. 341 D RT. 004 RW. 004 Kel. Margahayu Selatan Bandung
5.	Melvin Wangkar	Komisaris Utama	3171011105900001	Suhendra	Direktur	3172061710890002	Sewa Kendaraan	Rp. 206.500.000	Sewa Kendaraan Operasional Kantor
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Ada 5 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan pada Semester 1 (Satu) Tahun 2026									

16. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerimaan Dana	Jumlah (Rp)
1.	11 Maret 2026	Kegiatan Sosial	Kegiatan ini dilaksanakan secara khusus pada bulan Ramadhan. Program CSR ini berfokus pada kegiatan berbagi dan kepedulian sosial, seperti pembagian paket sembako dan santunan anak yatim piatu.	CSR KMI Peduli Berbagi 2026 (Bantuan Sosial) kepada Panti Yatim Piatu	Rp 8.819.500
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian dana untuk kegiatan sosial di lingkungan masyarakat sekitar pada Semester 1 (Satu) Tahun 2026 : Hanya ada 1 kegiatan sosial pada semester 1 tahun 2026 yang dilakukan.					

Tangerang Selatan, 30 Juli 2026
PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA

Disetujui Oleh

Andy
Direktur Utama

Melvin Wangkar
Komisaris Utama

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Semester 1 Tahun 2026
PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA Semester 1 Tahun 2026. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Tangerang Selatan, 30 Juli 2026

PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA

Andy
Direktur Utama

Melvin Wangkar
Komisaris Utama

KERTAS KERJA LAPORAN
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER 1 (SATU)
TAHUN 2026

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, berjalan dengan telah terpenuhi.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia telah melakukan penilaian terhadap indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	<i>Baik</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia telah melaksanakan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	<i>Sangat Baik</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia telah pemantauan yang baik terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	<i>Sangat Baik</i>	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	<i>Baik</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.

7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Sangat Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	Manajemen BPR Kredit Mandiri Indonesia telah menilai bahwa indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, berjalan dengan sangat baik.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Sangat Baik	Penilaian terhadap indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan penilaian sangat baik.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Sangat Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, yang dimiliki BPR dinilai baik

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	6 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham	
Nilai Faktor	
Nilai 1 (Sangat Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola sangat memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terealisasi sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. - Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi secara berkala sehingga seluruh pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1) Faktor Positif	1. BPR memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penilaian terhadap indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2) Faktor Negatif	
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1) Faktor Positif	1. Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris 2. Pemantauan yang baik terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris 3. Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, 4. BPR memperlihatkan indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 5. Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
2) Faktor Negatif	
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1) Faktor Positif	1. BPR memperlihatkan indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, berjalan dengan sangat baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, BPR tergolong baik. 4. BPR memiliki indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan penilaian telah terpenuhi.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Berdasarkan hasil penilaian, seluruh anggota Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Seluruh Anggota Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia tidak merangkap tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Seluruh Anggota Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	<i>Telah Terpenuhi</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia sudah membentuk Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif diantaranya Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi

6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. Pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. Prosedur pengambilan keputusan Direksi.	<i>Telah Terpenuhi</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi diantaranya : a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Seluruh Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	<i>Sangat Baik</i>	Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	<i>Baik</i>	Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, di BPR menunjukkan kondisi baik.

12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif terhadap pelaksanaan Auditor Intern, Auditor Ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lain.</i>
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	<i>Baik</i>	<i>Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris</i>
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Pengambilan keputusan Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia berdasarkan musyawarah mufakat atau sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku.</i>
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.</i>
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</i>
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya</i>

18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Sangat Baik	Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media elektronik yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19	Direksi mengungkapkan: a. Kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Sangat Baik	Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia mengungkapkan: a. Kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Sangat Baik	Seluruh Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia telah menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, berjalan dengan sangat baik.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Baik	Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Baik	Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Sangat Baik	Seluruh BPR Kredit Mandiri Indonesia Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Sangat Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Sangat Baik	Keputusan Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Sangat Baik	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Sangat Baik	Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia sesuai ekspektasi stakeholders, berjalan dengan sangat baik.
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihakpihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sangat Baik	Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia memberikan pembelajaran kepada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan .

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	15 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik

Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
Nilai Faktor	
Nilai 1 (Sangat Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi telah sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Direksi memenuhi sepenuhnya persyaratan selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik dan hasil kinerja Direksi sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. - Direksi melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk pembentukan satuan kerja atau pengangkatan Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan ketentuan sehingga mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola. - Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi ruang lingkup telah sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis telah terlaksana dengan baik. - Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. - Direksi telah melakukan tindak lanjut terhadap sebagian temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain sehingga tidak terdapat temuan dan/atau temuan berulang yang bersifat substantif.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	- Anggota Direksi ada 6 Orang, terdiri dari 1 orang Direktur Utama dan 4 orang Direktur. dan 1 Direktur yang membawahkan Kepatuhan - Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. - Seluruh Anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa

	Keuangan. 4. BPR sudah membentuk Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif diantaranya Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. 5. BPR sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi diantaranya : a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. Pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. Prosedur pengambilan keputusan Direksi. 6. Implementasi indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR. 7. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan. 8. Seluruh Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen. 2. Direksi cukup baik dalam melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi 3. Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif terhadap pelaksanaan Auditor Intern, Auditor Ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lain. 4. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data termasuk kepada Dewan Komisaris. 5. Pengambilan keputusan Direksi berdasarkan musyawarah mufakat atau sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku. 6. Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 7. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 8. Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 9. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media elektronik yang mudah diakses oleh seluruh pegawai. 10. Direksi mengungkapkan: a. Kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan b. Hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR 11. Seluruh Direksi telah menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, berjalan dengan sangat baik. 12. Seluruh Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.

	13. Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Seluruh Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS 2. BPR memiliki indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR. 3. Keputusan Direksi menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. 4. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. 5. Direksi sesuai ekspektasi stakeholders, berjalan dengan sangat baik. 6. Direksi memberikan pembelajaran kepada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	3 orang BPR Kredit Mandiri Indonesia terdiri dari 1 Komisaris Utama, dan 2 Komisaris Independen, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. Pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki pedoman dan tata tertib kerja diantaranya: a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.

4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (Satu) BPR atau BPR Syariah lain dan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif di lembaga keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Sebagian Terpenuhi</i>	Komisaris Utama BPR Kredit Mandiri Indonesia ada hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham dan 2 Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Seluruh Komisaris Independen BPR Kredit Mandiri Indonesia tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Seluruh Anggota Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Sangat Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Sangat Baik	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Sangat Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Sangat Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.

14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Sangat Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sangat Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sangat Baik	Anggota Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Anggota Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia melaksanakan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Sangat Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Sangat Baik	Manajemen BPR Kredit Mandiri Indonesia telah menilai bahwa Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, berjalan dengan sangat baik.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab didalam pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		6 Indikator	

Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	14 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. - Dewan Komisaris telah memiliki dan mengingkan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. - Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. - Dewan Komisaris telah memiliki dan menginkan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Jumlah Anggota Komisaris 3 orang. Terdiri dari 1 Komisaris Utama, dan 2 Komisaris Independen, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja diantaranya: a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. Pengaturan rapat Dewan Komisaris. 3. Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (Satu) BPR atau BPR Syariah lain dan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif di lembaga keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 4. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain. 5. Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR. 6. Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
2)	Faktor Negatif
	BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai sebagian terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. 2. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan. 3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 4. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. 5. Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional BPR. 6. Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota

	Dewan Komisaris. 7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 8. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 9. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 10. Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. 11. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. 12. Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia melaksanakan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. 13. Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
2) Faktor Negatif	
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1) Faktor Positif	
	1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. 3. Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
2) Faktor Negatif	
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki Komite Audit, Komite, Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing - masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	<i>BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing - masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Komite Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit</i>
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.</i>
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.</i>
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</i>
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Komite BPR Kredit Mandiri Indonesia yang dibentuk sudah menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.</i>
8	Masing - masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Masing- masing komite BPR Kredit Mandiri Indonesia menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja komite.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Sangat Baik	Komite Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Komite Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Sangat Baik	Hasil rapat komite BPR Kredit Mandiri Indonesia dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		9 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Sangat Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Sangat Baik	

Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
Nilai Faktor	
Nilai 1 (Sangat Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi. - Masing- masing komite telah memiliki dan menginisikan pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	- BPR memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. - BPR memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif

	1. Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit 2. Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 3. Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. 4. Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 5. Komite yang dibentuk sudah menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. 6. Masing- masing komite menyusun dan/ atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja komite.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
Faktor Positif	
	1. Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi. 2. Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. 3. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
Faktor Negatif	
PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.	

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sangat Baik	Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Sangat Baik	Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR Kredit Mandiri Indonesia menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Sangat Baik	Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR. Namun jika ada benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR akan diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta akan didokumentasi dengan baik.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Sangat Baik	Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, sehingga BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	

Indikator dengan nilai Sangat Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan	
Nilai Faktor	
Nilai 1 (Sangat Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup sangat memadai. - Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan berpotensi merugikan BPR. - Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara sangat baik.	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif

	1. Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan. 2. Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR. Namun jika ada benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR akan diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta akan didokumentasi dengan baik. 3. Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, sehingga BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR Kredit Mandiri Indonesia sudah memenuhi persyaratan diantaranya : 1. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama; 2. Tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan 3. Mampu bekerja secara independen.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan modal inti BPR yang lebih dari Rp. 50.000.000.000.

3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	<i>Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif BPR Kredit Mandiri Indonesia yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.</i>
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	<i>Telah Terpenuhi</i>	<i>BPR Kredit Mandiri Indonesia telah menempatkan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang baik pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif untuk menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR Kredit Mandiri Indonesia merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.</i>
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR Kredit Mandiri Indonesia memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan,</i>
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan BPR Kredit Mandiri Indonesia melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	<i>Baik</i>	<i>BPR Kredit Mandiri Indonesia memperlihatkan indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</i>

9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sangat Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR Kredit Mandiri Indonesia menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
---	---	--------------------	--

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 1 (Sangat Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nilai Faktor
Nilai 1 (Sangat Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan tidak terdapat pelanggaran yang signifikan atau berhasil menurunkan tingkat pelanggaran signifikan.
- b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.
- c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginikasikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memenuhi persyaratan diantaranya : a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. Tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana 2. Mampu bekerja secara independen. 3. BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan modal inti BPR yang lebih dari Rp. 50.000.000.000. 4. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. 5. BPR telah menempatkan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang baik pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif untuk menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif

1.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, pada BPR berada dalam kondisi baik.
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan,
3.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	1. PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Satuan kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif BPR Kredit Mandiri Indonesia yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris

3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Manajemen BPR Kredit Mandiri Indonesia telah menilai bahwa indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif BPR Kredit Mandiri Indonesia yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	<i>Telah Terpenuhi</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	<i>Sangat Baik</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	<i>Sangat Baik</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	<i>Sangat Baik</i>	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) BPR Kredit Mandiri Indonesia dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	<i>Baik</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesia mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sangat Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesia menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		5 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		5 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Sangat Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Sangat Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Sangat Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 1 (Sangat Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
Nilai Faktor	
Nilai 1 (Sangat Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan sangat baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. - Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	- BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. - Satuan kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris - Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional. - Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. - BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	- BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR. - BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun - Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai

	yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
	4. BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR membuat rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	<i>Telah Terpenuhi</i>	<i>Penugasan audit kepada Akun Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	<i>Sangat Baik</i>	<i>BPR Kredit Mandiri Indonesia menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit.</i>
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	<i>Sangat Baik</i>	<i>BPR Kredit Mandiri Indonesia telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.</i>
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Sangat Baik</i>	<i>Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	

Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
Nilai Faktor	
Nilai 1 (Sangat Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang - undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan seluruh permasalahan BPR.	
Analisa Faktor Positif dan Negatif	
A. Struktur dan Infrastruktur	
1) Faktor Positif	

	1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit. 2. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas. 2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	<i>Telah Terpenuhi</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<i>Telah Terpenuhi</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Baik</i>	BPR telah mengimplementasikan indikator Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.

5	Direksi: a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi c. Melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Cukup Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki indikator Direksi: a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. Melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan pencapaian cukup baik.
6	Dewan Komisaris: a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	Dewan Komisaris BPR Kredit Mandiri Indonesia : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dengan penilaian cukup baik.
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesia melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang bersifat material.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesia menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.

9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesia sudah baik dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesia sudah baik dalam menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesiasudah baik dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesiasudah baik dalam menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesiamemiliki sistem informasi yang cukup memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, berjalan dengan cukup baik.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Baik	Direksi BPR Kredit Mandiri Indonesia telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Sangat Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesia menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesia telah mengimplementasikan indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Sangat Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		10 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	
Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud			
Nilai Faktor			
Nilai 2 (Memadai)			

Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. - BPR telah memiliki dan menginisiasi pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut - Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	- BPR memiliki indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. - BPR memiliki indikator BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, indikator BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko. - BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	- Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. - BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang bersifat material. - BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan. - BPR sudah baik dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

	terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 5. BPR sudah baik dalam menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 6. BPR sudah baik dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 7. BPR sudah baik dalam menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 8. BPR memiliki sistem informasi yang cukup memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, berjalan dengan cukup baik. 9. Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	BPR Kredit Mandiri Indonesia memperlihatkan indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Sangat Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesia sudah mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Sangat Baik	Proses pemberian kredit oleh BPR Kredit Mandiri Indonesia kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Laporan pemberian kredit oleh BPR Kredit Mandiri Indonesia kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		4 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	

Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit	
Nilai Faktor	
Nilai 1 (Sangat Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: - BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan mengkinikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup sangat memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK secara berkala kepada seluruh sumber daya manusia BPR. - Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap seluruh proses pemberian kredit secara berkala sehingga tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1) Faktor Positif	
BPR memperlihatkan indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	
2) Faktor Negatif	
PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.	
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif

	1. BPR sudah mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. BPR memiliki indikator BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Terpenuhi	BPR Kredit Mandiri Indonesia menyediakan sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	BPR Kredit Mandiri Indonesia telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.

3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	<i>Telah Terpenuhi</i>	<i>BPR Kredit Mandiri Indonesia telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, berjalan dengan telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	<i>Sangat Baik</i>	<i>BPR Kredit Mandiri Indonesia memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.</i>
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Sangat Baik</i>	<i>BPR Kredit Mandiri Indonesia menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</i>
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Sangat Baik</i>	<i>BPR Kredit Mandiri Indonesia telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan.</i>
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Baik</i>	<i>BPR Kredit Mandiri Indonesia telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Sangat Baik</i>	<i>BPR Kredit Mandiri Indonesia menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>

9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Sangat Baik	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Sangat Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Implementasi indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sangat Baik	Implementasi indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan..
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	

Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	8 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
Nilai Faktor	
Nilai 1 (Sangat Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang sangat memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.
- BPR telah memiliki dan menginisiasi secara berkala kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup sangat memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.
- BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR Menyediakan sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu 2. BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris. 3. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, berjalan dengan telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan. 3. BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 4. BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 5. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif

	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat. 2. Implementasi indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan 3. Implementasi indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan..
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	<i>Telah Terpenuhi</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<i>Telah Terpenuhi</i>	Rencana bisnis BPR Kredit Mandiri Indonesia menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	<i>Telah Terpenuhi</i>	BPR Kredit Mandiri Indonesia didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, dengan pencapaian telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. Faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko.	<i>Sangat Baik</i>	Indikator Rencana bisnis BPR Kredit Mandiri Indonesia disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal BPR, asas perbankan dan penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	<i>Sangat Baik</i>	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Kredit Mandiri Indonesia
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	<i>Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</i>
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Baik	<i>BPR Kredit Mandiri Indonesia telah mengimplementasikan kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dengan penilaian baik</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR	
Nilai Faktor	
Nilai 1 (Sangat Memadai)	

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai melebihi target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan seluruh komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. 2. Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, dengan pencapaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal BPR, azas perbankan dan penerapan manajemen risiko. 2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif

	1. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 2. Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 1 (Sangat Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 1 (Sangat Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 1 (Sangat Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 1 (Sangat Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 1 (Sangat Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 1 (Sangat Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 1 (Sangat Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 1 (Sangat Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 1 (Sangat Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Modus Nilai Faktor		Nilai 1
Median Nilai Faktor		Nilai 1
Rata-rata Nilai Faktor		Nilai 1
Peringkat Komposit		1
Predikat Komposit		Sangat Baik
Kesimpulan		

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
2. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
3. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
4. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
5. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
9. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
10. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
11. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Implementasi proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondisi sangat memadai.
2. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai sangat memadai.
3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian sangat memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan sangat memadai.
5. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi sangat memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan pencapaian memadai.
7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian sangat memadai.
8. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit

Ekstern dengan penilaian sangat memadai. 9. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai memadai. 10. Proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR saat ini dinilai sangat memadai. 11. Proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR saat ini dinilai memadai. 12. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai sangat memadai.
C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola
1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPR tergolong sangat memadai. 2. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian sangat memadai. 3. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dinilai sangat memadai. 4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite BPR tergolong sangat memadai. 5. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai sangat memadai. 6. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan penilaian memadai. 7. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai sangat memadai. 8. Implementasi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern di BPR menunjukkan kondisi sangat memadai. 9. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai memadai. 10. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai sangat memadai. 11. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR dinilai sangat memadai. 12. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan penilaian sangat memadai.
Faktor Negatif
A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur
1. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan masih terpenuhi sebagian. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong masih terpenuhi sebagian-sebagian.

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;
- b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- c. Melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan
- d. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Tidak ada faktor negatif terkait hasil penerapan tata kelola

KESIMPULAN UMUM

HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER 1 TAHUN 2026

Nama BPR : PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA
 Alamat : Jl Boulevard BSD Timur Blok AH 2 No 7, Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15310
 Nomor Telepon : (021) 80634561
 Posisi Laporan : Semester 1 (Satu) Tahun 2026
 Modal Inti : Rp. 182.347.115.220
 Total Aset : Rp. 1.035.053.536.285

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 1 (Sangat Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 1 (Sangat Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 1 (Sangat Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 1 (Sangat Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 1 (Sangat Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 1 (Sangat Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 1 (Sangat Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 1 (Sangat Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 1 (Sangat Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
3. Struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
6. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
7. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
9. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
10. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
11. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR berada dalam kondisi sangat memadai.
2. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan

Wewenang Direksi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai sangat memadai. - Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai sangat memadai. - BPR memiliki proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang dinilai sangat memadai. - Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi sangat memadai. - Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi sangat memadai. - Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian sangat memadai. - BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dinilai sangat memadai - BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dinilai memadai. - Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR adalah sangat memadai. - Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR berada dalam kondisi memadai. - BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan penilaian sangat memadai.	C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola
- Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPR tergolong sangat memadai. - BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian sangat memadai. - BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dinilai sangat memadai. - Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite BPR tergolong sangat memadai. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai sangat memadai. - BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan penilaian memadai. - BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai sangat memadai. - Implementasi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern di BPR menunjukkan kondisi sangat memadai. - Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai memadai. - Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai sangat memadai. - Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR dinilai sangat memadai. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai sangat memadai.	

Faktor Negatif
A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur
1) Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan masih terpenuhi sebagian. 2) Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong masih terpenuhi sebagian sebagian.
B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola
Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi: a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. Melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.
C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola
Tidak ada faktor negatif terkait hasil penerapan tata kelola